

PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA



2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP



**DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PTSP**
KUTAI KARTANEGARA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/ kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021– 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disajikan masih jauh dari sempurna, sehingga kami selaku penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan selanjutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun, Semoga dapat bermanfaat bagi DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kutai Kartanegara, 23 Februari 2026

Kepala

Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Kutai Kartanegara,



ALFIAN NOOR, SE., M. LING.

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19690113 199503 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Dasar Hukum.....	2
III. Tugas dan Fungsi.....	3
IV. Permasalahan dan Isu Strategis.....	4
V. Uraian Singkat Organisasi.....	6
VI. Sumber Daya Manusia.....	9
VII. Sarana Prasarana.....	12
VIII. Sistematika Laporan.....	32
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	33
I. Perencanaan Strategis.....	33
II. Telaahan Visi Misi Kepala Daerah.....	33
III. Tujuan dan Sasaran.....	34
IV. Indikator Kinerja Utama.....	35
V. Rencana Kerja Tahunan.....	36
VI. Strategi.....	43
VII. Arah Kebijakan.....	43
VIII. Program.....	44
IX. Perjanjian Kinerja.....	44
X. Rencana Anggaran Tahun 2025.....	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	53
I. Capaian Kinerja.....	53
II. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya.....	54
III. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	57
IV. Perbandingan Antara Realisasi Investasi Kab. Kukar dengan Kabupaten/ Kota lainnya.....	60
V. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya.....	61

VI. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	61
VII. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	63
VIII. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis.....	64
IX. Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya.....	67
BAB IV PENUTUP.....	78
I. Kesimpulan.....	78
II. Perbaikan Kedepan.....	79
LAMPIRAN.....	viii

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pemetaan Permasalahan.....	5
Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan.....	9
Tabel 3. Daftar Aset tetap Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025.....	12
Tabel 4. Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	34
Tabel 5. Tujuan/ Sasaran Strategis DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara 2021-2026.....	35
Tabel 6. IKU (Indikator Kinerja Utama) DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.....	36
Tabel 7. Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025.....	37
Tabel 8. Strategi dan Arah Kebijakan.....	44
Tabel 9. Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025.....	44
Tabel 10. Perjanjian Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025.....	45
Tabel 11. Perjanjian Kinerja Tambahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025.....	45
Tabel 12. Perbandingan Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2025 Dengan Data Awal Tahun 2024 dan Target Tahun 2025.....	46
Tabel 13. Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	46
Tabel 14. Program Kegiatan dan sub kegiatan beserta anggaran (APBD) Tahun 2025.....	47
Tabel 15. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	54
Tabel 16. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dan 2025.....	54
Tabel 17. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025.....	58
Tabel 18. Perbandingan Realisasi Invstasi PMDN Kabupaten Kota Di Provinsi Kalimantan Timur.....	60

	Halaman
Tabel 19. Perbandingan Realisasi Investasi PMA Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Timur.....	60
Tabel 20. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya (Tahun 2024).....	61
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	62
Tabel 22. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	63
Tabel 23. Indikator Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal dan Pengendalian Pelayanan Penanaman Modal.....	64
Tabel 24. Indikator Program Pelayanan Penanaman Modal.....	67
Tabel 25. Capaian Kinerja Program (Keberhasilan/ Kegagalan).....	67
Tabel 26. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	68
Tabel 27. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya (2024).....	74

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Keterkaitan Permasalahan utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026.....	4
Gambar 2.	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	8
Gambar 3.	Sumber Daya Maanusia Berdasarkan Pendidikan.....	11
Gambar 4.	Perbandingan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	11
Gambar 5.	Loket Layanan Terpadu Satu Pintu.....	19
Gambar 6.	Layanan Costumer Servis.....	20
Gambar 7.	Layanan POLRES.....	20
Gambar 8.	Layanan SAMSAT.....	21
Gambar 9.	Layanan Dinas Transmigrasi & Ketenagakerjaan, dan Layanan Imigrasi.....	21
Gambar 10.	Layanan Kantor Pertanahan dan Badan Amil Zakat.....	22
Gambar 11.	Layanan BPJS Ketenagakerjaan dan Layanan BPJS Kesehatan.....	22
Gambar 12.	Layanan TASPEN.....	23
Gambar 13.	Layanan DISDUKCAPIL.....	24
Gambar 14.	Layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Layanan Dinas Kelautan dan Perikanan.....	24
Gambar 15.	Layanan Pengadilan Agama.....	25
Gambar 16.	Layanan Perbankan (Bankaltimtara dan BRI).....	25
Gambar 17.	Layanan Pegadaian Persero.....	26
Gambar 18.	Pojok Baca Digital.....	26
Gambar 19.	Ruang Bermain Anak.....	27
Gambar 20.	Ruang Laktasi.....	27
Gambar 21.	Layanan Aksesibilitas dan Layanan Pengaduan.....	28
Gambar 22.	Alat cetak Mandiri.....	29
Gambar 23.	Ruang Tunggu.....	29
Gambar 24.	Ruang pernikahan/ Kantor Urusan Agama.....	31
Gambar 25.	Penerimaan Penghargaan 2025.....	62
Gambar 26.	Penerimaan Penghargaan 2025.....	62
Gambar 24.	Pendampingan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Kementerian Pemberdayaan dan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan capaian Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna terselenggaranya *good governance* di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan

pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan disusunnya Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan :

1. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada yang memberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai Upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan kinerja;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didalam menjalankan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

III. Tugas Pokok dan Fungsi

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diamatkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk membantu Bupati untuk melaksanakan tugas bidang urusan Penanaman Modal serta dekonsentrasi dan tugas bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan Perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Falisitasi Pembinaan Reformasi Birokrasi Dinas;
- d. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam lingkup dinas;
- e. Penyusunan Proses Bisnis Dinas;
- f. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Pelaksanaan dan penataan pelayanan perizinan berbasis risiko;
- i. Pelaksanaan tata kelola penanaman modal;
- j. Pelaksanaan Fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kasubag Umum Dan Tata Laksana

d. Kelompok Jabatan Fungsional

IV. Permasalahan dan Isu Strategis

A. Permasalahan

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan.

Permasalahan yang dirumuskan harus mampu menggambarkan setiap detil kondisi Kutai Kartanegara sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni: **“Belum Optimalnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Kartanegara”**. Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) pokok permasalahan sebagai berikut. (1.) Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik; (2.) Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia; (3.) Belum meratanya kualitas kesejahteraan masyarakat; (4.) Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah; (5.) Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah; dan (6.) Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup. Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1.
Keterkaitan Permasalahan utama dengan Permasalahan Pokok
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026



Daya Tarik investasi suatu daerah akan tinggi salah satunya jika terdapat kemudahan dalam pelayanan perizinan, dengan pelayanan perizinan yang efektif, efisien dan melayani maka akan terjadi percepatan Penanaman Modal pada Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dibutuhkan aparatur yang professional, standar prosedur yang jelas dan biaya pelayanan yang pasti. Menjawab tantangan untuk mencapai pelayanan perizinan yang efektif, efisien dan kepastian biaya, diperlukan kerja keras dan dukungan semua pihak. Dalam hal ini perlu adanya pembenahan kualitas dan motivasi aparatur pelaksanaan pelayanan tersebut.

Sebagai identifikasi awal terdapat beberapa permasalahan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta faktor- faktor yang mempengaruhinya, antara lain sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Iklim Investasi Penanaman Modal di Kutai Kartanegara.
2. Kurang Optimalnya Mutu Pelayanan Perizinan.

Tabel 1.
Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya Iklim Investasi Penanaman Modal di Kutai Kartanegara	Belum Optimalnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. - Belum tersedianya Data dan Peta Potensi Investasi Menuju Sektor Hilir
		Kurang Optimalnya Promosi Penanaman Modal	Belum Efektifnya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
		Belum Optimalnya Pengendalian Penanaman Modal	Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
		Belum Optimalnya Pengelolaan Data dan Penggunaan Sistem Informasi dalam Penanaman Modal	Belum Optimalnya Pengolahan, Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non-Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	Kurang Optimalnya Mutu Pelayanan Perizinan	Belum efektifnya Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal	Belum Efektifnya Layanan Konsultasi dan Pengaduan Perizinan dan Non-Perizinan

Sumber data : Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2021-2026

B. Isu- isu Strategis

Perumusan isu strategis Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perencanaan pembangunan daerah periode pembangunan 2021- 2026, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Kutai

Kartanegara yang telah diinventarisasi setiap permasalahan yang relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara periode pembangunan 2021- 2026 dijabarkan sebagai berikut:

- a. Implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh;
- b. Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia;
- c. Percepatan penanganan dan penanggulangan COVID-19 dan pemulihan dampaknya;
- d. Pengembangan perekonomian berkelanjutan;
- e. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
- f. Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah;
- g. Transformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan;
- h. Penataan Ruang dan Sumber Daya Air (Air Baku dan Irigasi).

Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun kedepan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis, lingkungan global yang kita hadapi bersama.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas Pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu isu- isu strategis yang harus mendapat perhatian antara lain:

1. Peningkatan kinerja kelembagaan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal;
3. Peningkatan konsistensi pelayanan penanaman modal;
4. Penyajian data dan informasi penanaman modal dan perizinan yang terintegrasi secara elektronik;
5. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

C. Uraian Singkat Organisasi

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diamatkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk membantu Bupati untuk melaksanakan tugas bidang urusan Penanaman Modal serta dekonsentrasi dan tugas bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

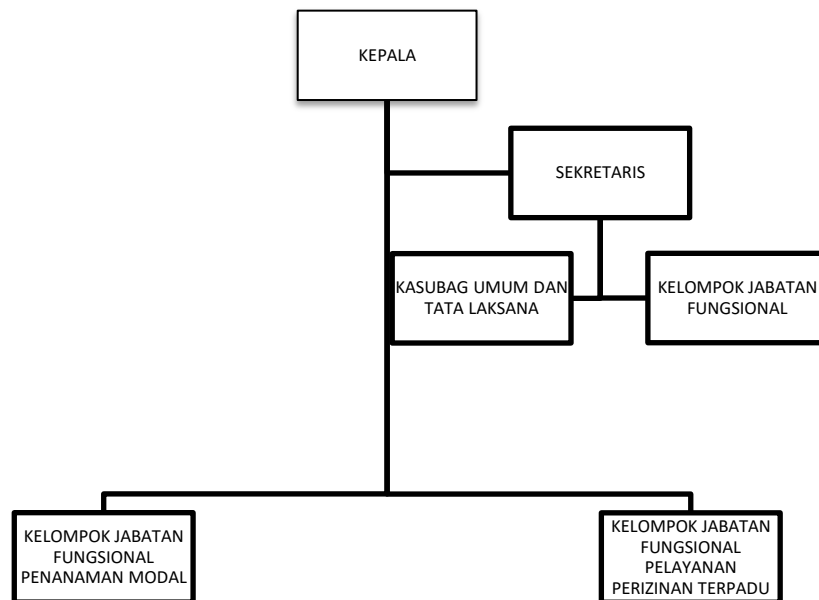
Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan Perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Falisitasi Pembinaan Reformasi Birokrasi Dinas;
- d. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam lingkup dinas;
- e. Penyusunan Proses Bisnis Dinas;
- f. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Pelaksanaan dan penataan pelayanan perizinan berbasis risiko;
- i. Pelaksanaan tata kelola penanaman modal;
- j. Pelaksanaan Fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kasubag Umum Dan Tata Laksana
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Uraian tugas dalam struktur secara singkat disampaikan sebagai berikut :

- Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintah wajib di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

- Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyajikan data dan informasi, serta mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta penyusunan program dan keuangan.

Dibawah sekretaris terdapat 2 bagian:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan, yang mempunyai tugas mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi urusan umum dan ketatalaksanaan.
2. Kelompok jabatan Fungsional.
 - a. Kepegawaian yang dijabat oleh Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
 - b. Penyusunan Program dan Keuangan yang dijabat oleh Perencana Ahli Muda

- Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan Promosi, Pengembangan Iklim, dan

Pengendalian Penanaman Modal dalam Upaya meningkatkan realisasi Penanaman Modal. Adapun Jabatan Fungsional tersebut yaitu:

1. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya;
2. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda;
3. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama.

- Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pelayanan elektronik, fasilitasi pelayanan, konsultasi, data dan sistem informasi, serta penguasaan dalam upaya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan terpadu satu pintu. Adapun Jabatan Fungsional tersebut yaitu :

1. Penata Kelola Perizinan Ahli Madya;
2. Penata Kelola Perizinan Ahli Muda;
3. Penata Kelola Perizinan Ahli Pertama.

D. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan motor penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat sejumlah aparatur maupun tenaga pendukung di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara. Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

Adapun jumlah pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebanyak 119 Orang, 66 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan sebanyak 53 Orang berstatus Tenaga Kontrak. Adapun komposisi mengenai Aparatur Sipil Negara pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP disajikan pada gambar-gambar berikut ini:

Tabel 2.
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan

Kode	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Pemangku	Kekurangan	Kelebihan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.18.01	Kepala Dinas	14	1	1	0	0
2.18.01.01	Sekretaris Dinas	12	1	1	0	0
2.18.01.01.01	Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, Dan Kepegawaian	9	1	1	0	0
2.18.01.01.01.01	Arsiparis Penyelia	8	0	0	0	0
2.18.01.01.01.02	Arsiparis Ahli Pertama	8	1	0	1	0
2.18.01.01.01.03	Arsiparis Mahir	7	1	0	1	0
2.18.01.01.01.04	Arsiparis Terampil	6	0	0	0	0

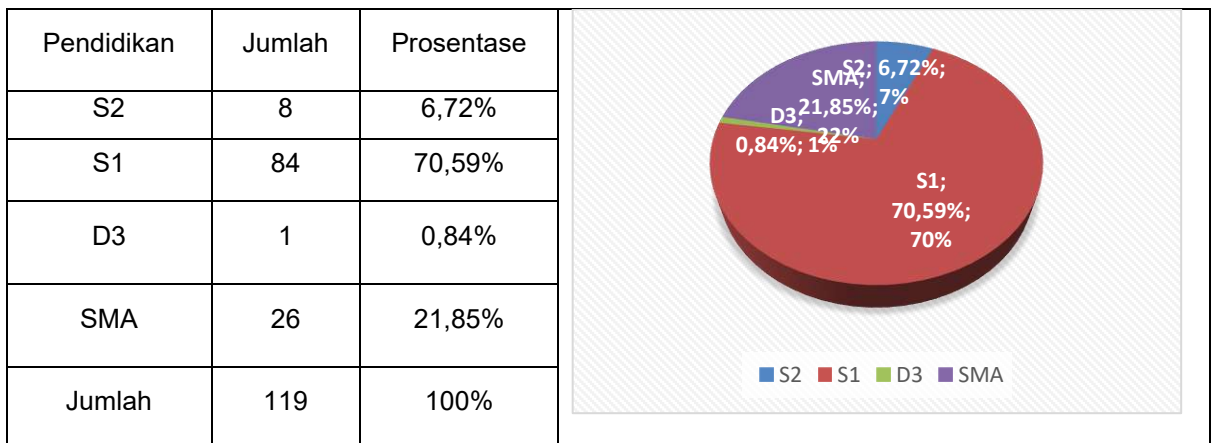
Kode	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Pemangku	Kekurangan	Kelebihan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.18.01.01.01.05	Penata Layanan Operasional	7	8	0	8	0
2.18.01.01.01.06	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0	0
2.18.01.01.01.07	Pengelola Layanan Operasional	6	2	0	2	0
2.18.01.01.01.08	Pengolah Data dan Informasi	6	3	3	0	0
2.18.01.01.01.09	Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0	0
2.18.01.01.02	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	1	1	0	0
2.18.01.01.03	Perencana Ahli Muda	10	1	0	1	0
2.18.01.01.04	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	1	0	1	0
2.18.01.01.05	Perencana Ahli Pertama	8	1	0	1	0
2.18.01.01.06	Penata Layanan Operasional	7	16	0	16	0
2.18.01.01.07	Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	4	0	0
2.18.01.01.08	Pengelola Layanan Operasional	6	2	0	2	0
2.18.01.01.09	Pengolah Data dan Informasi	6	5	5	0	0
2.18.01.01.10	Pengadministrasi Perkantoran	5	3	3	0	0
2.18.01.02	Penata Perizinan Ahli Madya	12	2	2	0	0
2.18.01.03	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	0	0	0
2.18.01.04	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	12	3	1	2	0
2.18.01.05	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	0	0	0
2.18.01.06	Penata Perizinan Ahli Muda	10	3	3	0	0
2.18.01.07	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	10	7	7	0	0
2.18.01.08	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	0	0	0
2.18.01.09	Arsiparis Ahli Pertama	8	2	0	2	0
2.18.01.10	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	8	10	2	8	0
2.18.01.11	Penata Perizinan Ahli Pertama	8	3	3	0	0
2.18.01.12	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	4	0	4	0
2.18.01.13	Penata Layanan Operasional	7	2	0	2	0
2.18.01.14	Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	5	0	0
2.18.01.15	Pengelola Layanan Operasional	6	2	0	2	0
2.18.01.16	Pengolah Data dan Informasi	6	14	14	0	0
2.18.01.17	Pengadministrasi Perkantoran	5	6	6	0	0
	Jumlah		119	66	53	0

Sumber data : sub bagian kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2025

Berdasarkan analisa jabatan, dapat dihitung kebutuhan pegawai sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.1, dimana masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 36 orang dan sebagai bentuk optimalisasi tugas dan fungsi instansi karena kurangnya dukungan tenaga SDM dari Aparatur Sipil Negara (ASN), kekurangan tersebut diisi oleh PPPK dengan Jabatan penata Kelola Sistem Informasi sebanyak 4 orang, Penata Layanan Operasional sebanyak 22 orang,

Pengadministrasi perkantoran sebanyak 16 Orang, dan tenaga kontrak sebanyak 11 orang. Dengan adanya PPPK ini diharapkan organisasi dapat bekerja optimal dalam membantu pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

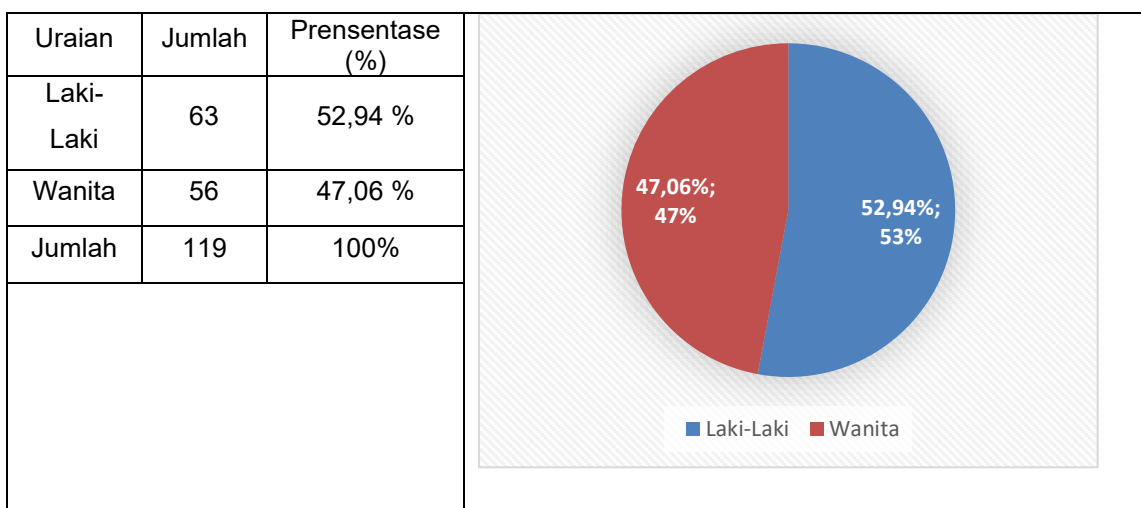
Gambar 3.
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan



Sumber data : Sumber data : Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2025-2029

Berdasarkan data pada gambar dan tabel 2.2 diatas tingkat pendidikan SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 84 orang (70,59%), disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 26 orang (21,85%), S2 sebanyak 8 orang (6,72%), D3 sebanyak 1 orang (0,84%).

Gambar 4.
Perbandingan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber data : Sumber data : Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2025-2029

Komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang relatif seimbang. Dari total 119 pegawai, sebanyak 63 orang atau 52,94 persen berjenis kelamin laki-laki dan 56 orang atau 47,06 persen berjenis kelamin perempuan.

Data ini mencerminkan bahwa DPMPTSP telah memberikan ruang partisipasi yang hampir setara bagi laki-laki dan perempuan dalam struktur organisasi, sehingga potensi sumber daya manusia dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa adanya dominasi gender tertentu. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menekankan keadilan, inklusivitas, dan kesetaraan kesempatan kerja.

Keseimbangan komposisi gender tersebut menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan. Keterlibatan perempuan yang signifikan dalam struktur kepegawaian DPMPTSP berkontribusi terhadap pengambilan keputusan yang lebih responsif, sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada pelayanan yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia di DPMPTSP tidak hanya mencerminkan pemenuhan prinsip kesetaraan gender, tetapi juga mendukung pencapaian kinerja organisasi yang efektif dan akuntabel.

E. Sarana Dan Prasarana

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai data asset tetap dan asset lainnya per 31 Desember 2025 terdapat sebanyak 1.564 item barang senilai Rp. 20.981.282.382,75 dengan garis besar rincian sebagai berikut:

Tabel 3.
Data Aset DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara
Per 31 Desember Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)	KONDISI ASET
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	1.315	18.729.373.224,00	Baik
	ALAT BESAR	2	18.750.000,00	Baik
	- alat pengangkat lainnya (dst)	1	1.250.000,00	Baik
	- electric generating set lainnya (dst)	1	17.500.000,00	Baik
	KOMPUTER	464	8.448.848.620,00	Baik
	- Mainframe (Komputer Jaringan)	47	592.735.679,00	Baik
	- Local Area Network (LAN)	11	115.830.000,00	Baik
	- Komputer Jaringan lainnya	1	8.250.000,00	Baik
	- P.C Unit	70	1.976.513.395,00	Baik
	- Lap Top	51	1.211.543.415,00	Baik
	- Note Book	11	257.570.400,00	Baik
	- Tablet PC	2	26.399.150,00	Baik
	- Hard Disk	15	251.073.785,00	Baik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)	KONDISI ASET
	- Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	1	5.772.000,00	Baik
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	27.236.000,00	Baik
	- CPU (Peralatan Personal Komputer)	4	122.222.000,00	Baik
	- Monitor	40	1.435.820.700,00	Baik
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	154	729.376.376,00	Baik
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	15	170.933.900,00	Baik
	- Capture Card	2	4.928.000,00	Baik
	- External/ Portable Hardisk	3	8.842.500,00	Baik
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	1	35.039.000,00	Baik
	- Server	4	1.268.915.440,00	Baik
	- Router	1	2.113.100,00	Baik
	- Hub	8	9.590.880,00	Baik
	- Wireless Access Point	3	33.300.000,00	Baik
	- Switch	1	36.110.000,00	Baik
	- Peralatan Jaringan lainnya	15	68.200.000,00	Baik
	- Peralatan Komputer lainnya	3	50.532.900,00	Baik
	ALAT EKSPLORASI	1	32.340.000,00	Baik
	- alat eksplorasi topografi lainnya lainnya (dst)	1	32.340.000,00	Baik
	PERALATAN OLAH RAGA	2	23.972.000,00	Baik
	- Peralatan Permainan lainnya	2	23.972.000,00	Baik
	ALAT ANGKUTAN	11	2.036.279.450,00	Baik
	- Station Wagon	5	1.221.679.450,00	Baik
	- Multi Purpose Vehicle (MPV)	1	450.100.000,00	Baik
	- Sepeda Motor	2	34.610.000,00	Baik
	- Kapal Visual Mini	2	95.920.000,00	Baik
	- kapal terbang lainnya (dst)	1	233.970.000,00	Baik
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	39	342.950.000,00	Baik
	- Battery Charge	8	18.395.000,00	Baik
	- Reciver	1	15.000.000,00	Baik
	- Global Positioning System	5	185.405.000,00	Baik
	- Scanner (Universal Tester)	25	124.150.000,00	Baik
	ALAT PERTANIAN	1	4.028.000,00	Baik
	- Lemari Penyimpan	1	4.028.000,00	Baik
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	687	6.860.418.014,00	Baik
	- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	3	9.600.000,00	Baik
	- Mesin Fotocopy Folio	2	14.660.000,00	Baik
	- Lemari Besi/Metal	6	52.073.000,00	Baik
	- Lemari Kayu	32	497.580.000,00	Baik
	- Rak Besi	18	28.116.000,00	Baik
	- Filing Cabinet Besi	4	10.000.000,00	Baik
	- Brandkas	3	57.903.500,00	Baik
	- Kontainer	1	94.787.000,00	Baik
	- Lemari Kaca	3	13.125.000,00	Baik
	- CCTV - Camera Control Television System	20	34.750.000,00	Baik
	- White Board	1	33.243.000,00	Baik
	- Alat Penghancur Kertas	9	32.507.000,00	Baik
	- Mesin Absensi	4	68.056.000,00	Baik
	- Display	1	10.000.000,00	Baik
	- Mesin Laminating	1	120.157.500,00	Baik
	- Alat Sidik Jari	2	97.884.500,00	Baik
	- Papan Nama Instansi	1	1.500.000,00	Baik
	- Alat Kantor Lainnya	17	84.243.796,00	Baik
	- Meja Kerja Kayu	14	814.698.000,00	Baik
	- Meja Rapat	1	35.959.000,00	Baik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)	KONDISI ASET
	- Meja Resepsionis	1	121.256.250,00	Baik
	- Meja Tambahan	32	271.101.879,00	Baik
	- Meja Panjang	14	78.768.200,00	Baik
	- Kursi Tamu	8	21.200.000,00	Baik
	- Partisi	13	23.712.299,00	Baik
	- Sofa	6	72.682.000,00	Baik
	- Lemari Es	6	13.365.000,00	Baik
	- A.C. Window	3	16.500.000,00	Baik
	- A.C. Split	34	649.272.000,00	Baik
	- Kipas Angin	3	11.907.900,00	Baik
	- Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1.750.000,00	Baik
	- Rice Warmer	1	26.875.000,00	Baik
	- Tabung Gas	2	2.000.000,00	Baik
	- Mixer	1	7.700.000,00	Baik
	- Televisi	18	600.120.500,00	Baik
	- Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	10.000.000,00	Baik
	- Loudspeaker	2	8.200.000,00	Baik
	- Sound System	1	19.088.000,00	Baik
	- Wireless	1	5.430.000,00	Baik
	- Microphone	1	3.265.900,00	Baik
	- Microphone Table Stand	8	13.332.000,00	Baik
	- Camera Video	1	3.926.000,00	Baik
	- Camera film	5	86.699.900,00	Baik
	- Lambang Garuda Pancasila	2	3.000.000,00	Baik
	- Tiang Bendera	1	2.000.000,00	Baik
	- Dispenser	17	235.749.000,00	Baik
	- Mimbar/Podium	1	10.234.000,00	Baik
	- Handy Cam	2	25.818.000,00	Baik
	- Alat Pemanas Ruangan	2	2.592.000,00	Baik
	- Lampu	4	13.506.900,00	Baik
	- Alat Pemadam Kebakaran lainnya	7	12.210.550,00	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	127.451.000,00	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	137.843.200,00	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	172.304.000,00	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	11.845.250,00	Baik
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	36	182.457.500,00	Baik
	- Meja Kerja Pejabat lain-lain	17	201.369.250,00	Baik
	- Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	19.600.000,00	Baik
	- Meja Tamu Biasa	1	1.215.014,00	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	39.842.333,00	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	24.616.333,00	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon V	1	7.736.333,00	Baik
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	77	296.048.426,00	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat lainnya	74	444.822.664,00	Baik
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon	4	30.945.332,00	Baik
II	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon	41	317.189.653,00	Baik
III	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon	2	15.472.666,00	Baik
IV	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon	2	15.472.666,00	Baik
V	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	20	84.860.000,00	Baik
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	37	245.219.820,00	Baik
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	68	557.402.390,00	Baik
	- Audio Mixing Console	2	13.620.000,00	Baik
	- Audio Mixing Portable	1	10.516.000,00	Baik
	- Audio Mixing Stationer	1	1.815.000,00	Baik
	- Audio Phone In	4	4.312.000,00	Baik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)	KONDISI ASET
	- Microphone/Wireless MIC	6	20.551.800,00	Baik
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	20	95.482.000,00	Baik
	- Digital Audio Taperecorder	2	4.530.280,00	Baik
	- Cable	4	5.720.000,00	Baik
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	2	4.488.000,00	Baik
	- Camera Electronic	4	86.308.240,00	Baik
	- Video Monitor	2	9.300.000,00	Baik
	- Video Switcher	1	21.340.000,00	Baik
	- Tripod Camera	1	1.089.000,00	Baik
	- Lensa Kamera	1	21.500.000,00	Baik
	- Layar Film/Projector	3	34.985.000,00	Baik
	- Camera Digital	3	144.170.070,00	Baik
	- Lampu Blitz Kamera	1	1.925.000,00	Baik
	- Video Conference	1	14.300.000,00	Baik
	- LCD Monitor	2	8.450.000,00	Baik
	- Alat Studio Video Lainnya	2	19.300.000,00	Baik
	- Telephone Mobile	2	10.600.000,00	Baik
	- Facsimile	1	2.000.000,00	Baik
	- Audio Monitor	2	21.100.000,00	Baik
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2	6.480.000,00	Baik
	- Kursi Dorong	1	3.985.000,00	Baik
	- Alat Kedokteran umum lainnya	1	2.495.000,00	Baik
	ALAT LABORATORIUM	34	386.684.750,00	Baik
	- Stabilizer	1	4.364.800,00	Baik
	- Meja Kerja	32	379.048.000,00	Baik
	- Portable Noise Monitoring	1	3.271.950,00	Baik
	ALAT PERSENJATAAN	4	11.220.000,00	Baik
	- Lemari Camera	1	6.270.000,00	Baik
	- Bateray Pack Camera	2	3.300.000,00	Baik
	- Tripot Background	1	1.650.000,00	Baik
2	EKS BPMPD	249	2.251.909.158,75	Baik
	KOMPUTER	69	708.328.488,77	Baik
	- P.C Unit	19	226.933.610,26	Baik
	- Lap Top	16	261.173.298,77	Baik
	- Note Book	5	108.955.000,00	Baik
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	90.322.579,74	Baik
	- External	3	13.475.000,00	Baik
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	1	7.469.000,00	Baik
	ALAT ANGKUTAN	16	609.127.000,00	Baik
	- kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	192.000.000,00	Baik
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	233.200.000,00	Baik
	- Sepeda Motor	13	183.927.000,00	Baik
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2	53.900.000,00	Baik
	- Global Positioning System	1	8.140.000,00	Baik
	- alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1	45.760.000,00	Baik
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	148	781.299.469,98	Baik
	- Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	15	44.715.000,00	Baik
	- Mesin Penghitung Uang	1	5.775.000,00	Baik
	- Lemari Besi/Metal	6	20.460.000,00	Baik
	- Filing Cabinet Besi	8	26.950.000,00	Baik
	- Lemari Makan	1	5.005.000,00	Baik
	- Mesin Absensi	2	12.045.000,00	Baik
	- Display	3	72.314.000,00	Baik
	- Meja Rapat	1	1.370.800,00	Baik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)	KONDISI ASET
	- Meja 1/2 Biro	3	15.773.670,00	Baik
	- Kursi Tamu	11	34.865.000,00	Baik
	- Sofa	2	50.050.000,00	Baik
	- Jam Mekanis	1	10.775.000,00	Baik
	- Mesin Pemotong Rumput	1	3.000.000,00	Baik
	- Lemari Es	4	10.360.500,00	Baik
	- A.C. Split	8	84.317.999,98	Baik
	- Televisi	5	112.205.000,00	Baik
	- Sound System	1	9.350.000,00	Baik
	- Wireless	1	14.630.000,00	Baik
	- Mic Conference	1	56.540.000,00	Baik
	- Tangga Aluminium	3	6.190.000,00	Baik
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	7.300.000,00	Baik
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	22	42.471.000,00	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2.310.000,00	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	6.160.000,00	Baik
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	16	16.544.000,00	Baik
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	24	109.822.500,00	Baik
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	4	46.365.000,00	Baik
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	1	12.155.000,00	Baik
	- Camera Electronic	1	12.100.000,00	Baik
	- Slide Projector	1	12.430.000,00	Baik
	- Lensa Kamera	1	9.680.000,00	Baik
	ALAT LABORATORIUM	4	44.494.000,00	Baik
	- Generator Set (Lab Scale)	1	15.014.000,00	Baik
	- Layar	1	14.850.000,00	Baik
	- Vacuum Drying Oven	2	14.630.000,00	Baik
	ALAT PERSENJATAAN	6	8.395.200,00	Baik
	- Dispencer	6	8.395.200,00	Baik
	TOTAL	1.564	20.981.282.382,75	

Sumber data : Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sementara dalam era digital ini DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki 14 sarana media informasi, database maupun pelayanan publik yang berbasis digital diantaranya:

1. Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara : www.dpmptsp.kukarkab.go.id;
2. Aplikasi database penanaman modal: NSWI (*National Sistem Windows For Investment*) merupakan sistem penanaman modal dari pemerintah pusat;
3. *Online Single Submission/ OSS* (merupakan sistem pelayanan perizinan terpadu dari pemerintah pusat);
4. Sistem SSO (*Single Sign On*) merupakan penyediaan identitas data pengguna dan mengaautentifikasi agar dapat mengakses aplikasi penyedia layanan : lawang-mpp.kukarkab.go.id ;
5. Aplikasi Pelongseng (Pelayanan Online Dengan Sistem Elektronik Berbasis Jaringan) merupakan aplikasi untuk mengurus perizinan yang telah

terintegrasi dengan sistem SSO yang dimiliki oleh Mal Pelayanan Publik Kutai Kartanegara. Fitur yang terdapat dalam aplikasi pelongseng terdapat fitur pengajuan izin secara online, persyaratan pengajuan izin, hingga pengambilan izin dan fitur download secara mandiri : layanannya.mpp.kukarkab.go.id;

6. Sistem web MPP merupakan aplikasi yang berisi informasi latar belakang, tupoksi, fasilitas gedung MPP, Layanan OPD/Instansi yang tergabung dalam MPP, Berita, pengumuman dan informasi lainnya, serta terkoneksi dengan sistem booking/ daftar antrian online: mpp.kukarkab.go.id;
7. Call Center Nomor : 0811-5944-009;
8. *Smart* Arsip berfungsi untuk memudahkan pengelolaan arsip secara digital, sistematis, terstruktur dan aman dengan websitenya smartarsip.kukarkab.kotapintar.id;
9. *Touchscreen* MPP merupakan aplikasi media informasi berbasis web untuk penjelasan yang terkait semua aplikasi di MPP Kutai Kartanegara dalam bentuk video : touchscreen-mpp.kukarkab.go.id;
10. SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) merupakan aplikasi untuk menampilkan jumlah responden, Nilai SKM dan Statistik jumlah data pendidikan dari keseluruhan Responden. Serta form pengisian data responden dan ada sebanyak 9 pertanyaan untuk pengunjung setelah mendapatkan pelayanan;
11. Metaverse sebagai media interaksi pelayanan peizinan dapat dilakukan secara virtual tanpa warga kota harus datang secara fisik ke kantor pemerintahan. metaverse-mpp.kukarkab.go.id;
12. Antrian MPP merupakan aplikasi pengambilan nomor antrian pelayanan : antrian-mpp.kukarkab.go.id;
13. Aplikasi drive thru merupakan aplikasi untuk memproses pencetakan dan pengambilan berkas yang diselesaikan dari pihak MPP : antrianonline.kukarkab.kotapintar.id/main/formdrivethru;
14. Aplikasi ACM (Anjungan Cetak Mandiri) sebuah aplikasi yang digunakan untuk mencetak produk- produk layanan MPP. Seperti dokumen SK Izin dan dokumen-dokumen produk MPP yang support untuk dicetak di mesin ACM, serta dapat mencetak informasi- informasi terkait layanan dan persyaratan: acmkukar.kotapintar.id;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, disebutkan dalam Pasal 42 dan 43 bahwa Sarana dan Prasarana penyelenggaraan PTSP paling sedikit meliputi:

1. Kantor depan (*front office*) paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.
2. Kantor belakang (*back office*) paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.
3. Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang *difabel* dan manula, ruang bermain anak, ruang arsip dan perpustakaan, toilet/kamar mandi, tempat ibadah, tempat parkir, ruang/tempat penjualan makanan dan minuman.
4. Alat/ fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon dan mesin faksimile, perangkat komputer, printer, *scanner*, mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin foto kopi, kamera pengawas (CCTV), koneksi internet, laman/website dan e-mail, alat penyedia daya listrik atau *uninterruptible power supply* (UPS), alat pemadaman kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, *banner*, petunjuk arah lokasi dan alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PTSP-elektronik, paling sedikit meliputi: koneksi internet; aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan non perizinan (*tracking system*), jejak audit (*audit trail*), *sms gateway*, dan arsip digital; pusat data (*data center*), dan *server* aplikasi dan pengamanan; telepon pintar (*smartphone*); dan alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang ada saat ini di DPMPSTSP Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menambahkan dan memperbaiki fasilitas yang ada seperti ruang rapat yang *representatif*, ruang tunggu, ruang bermain anak, ruang laktasi, dan masih banyak fasilitas yang perlu di penuhi baik di *front office*, *back office*, ruang pendukung dan alat/ fasilitas pendukung, termasuk fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan PTSP-elektronik.

Kesemua Peralatan tersebut digunakan untuk mendukung Pelayanan Perizinan baik itu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun Di Mal Pelayanan Publik/ MPP yang mana pada MPP memiliki 28 Entitas Layanan yang pada saat ini secara Kuantitatif sudah sebanding dengan beban Pekerjaan. Namun secara Kualitas ada beberapa sarana dan prasarana yang masih butuh perbaikan dan peremajaan, seperti Perkebangan Teknologi dan tuntutan pelayanan prima, Adapun sarana dan prasarana yang meunjang pelayanan tersebut yaitu :

1. Loker Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara didesain dengan ruang pelayanan yang digunakan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Ruang pelayanan berada di ruangan Mall Pelayanan Publik (MPP), yang didukung dengan fasilitas lengkap yang memadai, proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel, lantai yang selalu terlihat bersih, hawa ruangan yang terasa sejuk dan ruangan tertata rapi.

Gambar 5.
Loker Layanan Terpadu Satu Pintu



2. Layanan Costumer Servis

Di loket Costumer servis, petugas siap memberikan berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan serta berbagai pelayanan lain yang tersedia di Mall Pelayanan Publik dengan penuh keramahan, berpakaian seragam yang berbeda dengan pegawai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya, menghilangkan kesan birokrasi dalam proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

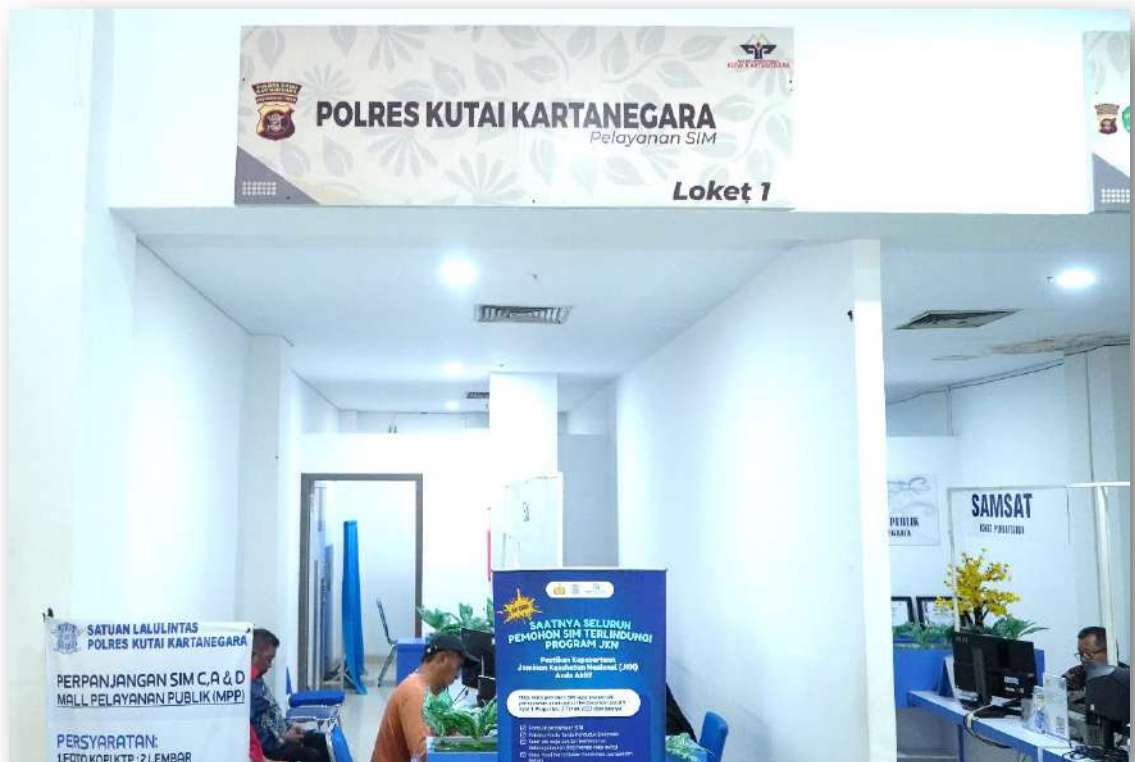
Gambar 6.
Layanan Costumer Servis



3. Prasarana Layanan Pendukung

Di Mall Pelayanan Publik tersedia beberapa prasarana layanan pendukung perizinan yang diharapkan mampu membantu para masyarakat (pemohon) dalam mengurus perizinan dan nonperizinan.

Gambar 7.
Layanan POLRES



Gambar 8.
Layanan POLRES DAN Layanan SAMSAT



Gambar 9.
Layanan Dinas Transmigrasi & Ketenagakerjaan dan Kantor Imigrasi Kelas 1



Gambar 10.
Layanan Kantor Pertanahan dan Badan Amil Zakat Nasional



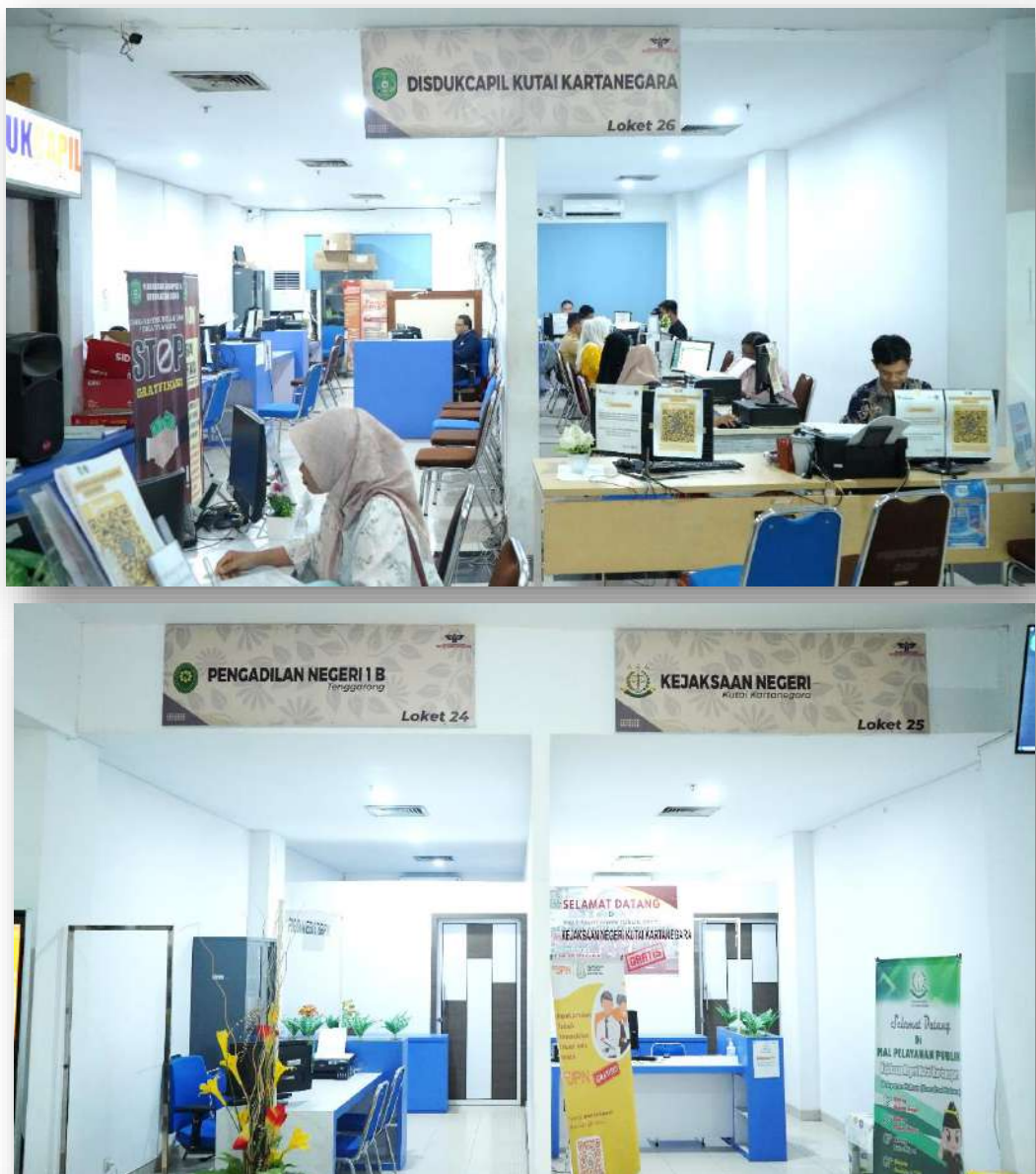
Gambar 11.
Layanan BPJS Ketenagakerjaan dan Layanan BPJS Kesehatan



Gambar 12.
Layanan TASPEN



Gambar 13
Layanan DISDUKCAPIL, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri



Gambar 14.
Layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Layanan Dinas Kelautan dan Perikanan



Gambar 15.
Pengadilan Agama



4. Prasarana pendukung lainnya seperti Bankaltimtara, Bank Rakyat Indonesia.

Dalam dalam satu gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara memperkuat konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*one stop service*) yang memudahkan pemohon dalam pengurusan perizinan dari pengajuan permohonan, pembayaran retribusi izin sampai kegiatan investasi perbankan lain sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

Gambar 16.
Layanan Perbankan (Bankaltimtara dan BRI)



Gambar 17.
Pegadaian Persero



5. Perpustakaan/ Pojok Baca

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Kartanegara menyediakan perpustakaan mini, yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai, pemohon izin dan tamu untuk membaca berbagai macam buku yang tersedia dalam bentuk fisik maupun digital.

Gambar 18.
Pojok Baca Digital



6. Ruang Bermain Anak

Ruang bermain anak disediakan untuk pemohon yang membawa putra putri kecilnya untuk mengurus izin agar anak tidak merasa bosan.

Gambar 19.
Ruang Bermain Anak



7. Ruang Laktasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menyediakan Ruang Laktasi yang disediakan untuk pegawai maupun pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya.

Gambar 20.
Ruang Laktasi



8. Layanan Pengaduan dan Aksesibilitas

Layanan Pengaduan merupakan salah satu sarana atau fasilitas pengaduan yang dapat digunakan oleh pemohon izin jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, sedangkan Aksesibilitas disediakan untuk memudahkan penyandang disabilitas, ibu hamil dan lansia yang menggunakan kursi roda dan tongkat.

Gambar 21.
Layanan Aksesibilitas dan Layanan Pengaduan





9. Alat Cetak Mandiri

Alat cetak mandiri dapat digunakan untuk membantu pemohon dalam memproses.

Gambar 22.
Alat cetak Mandiri



10. Ruang Tunggu

Ruang Tunggu Antrian terdapat di beberapa titik di lantai satu Mall Pelayanan Publik. Ruang Tunggu Antrian digunakan untuk memfasilitasi pemohon agar dapat duduk dengan nyaman ketika menunggu nomor antriannya dipanggil.

Gambar 23.
Ruang Tunggu



11. Layanan Pernikahan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara menyediakan fasilitas ruang akad nikah. Ruang akad nikah dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang menginginkan akad nikah diselenggarakan di Mal Pelayanan Publik.

Gambar 24.
Ruang pernikahan



F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| <i>BAB I</i> <i>Pendahuluan</i> | Menjelaskan secara ringkas kondisi umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi. |
| <i>BAB II</i> <i>Perencanaan Kinerja</i> | Menjelaskan secara ringkas Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasara, IKU, RKT, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan dokumen ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 serta Rencana Anggaran Tahun 2025. |
| <i>Bab III</i> <i>Akuntabilitas Kinerja</i> | Menjelaskan analisis pencapaian kinerja dan Realisasi, Menjelaskan analisis pencapaian kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2025 serta Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya (2023 dan 2024). |
| <i>Bab IV</i> <i>Penutup</i> | Menjelaskan simpulan umum atas Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dan langkah dimasa akan datang yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja. |

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

I. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah, yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021– 2026 dan diturunkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021- 2026. Perumusan atas Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas kemudian ditindak lanjuti guna dikembangkan secara lebih spesifik ke dalam tujuan dan sasaran agar dapat lebih mengarahkan arah kerja sebagai panduan dalam mencapai apa yang telah ditetapkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang dalam tahun ke depan.

II. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

“(Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia)”

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:



III. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Misi ke- 1 (Satu) yaitu **“Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”** dan misi ke tiga **“Memperkuat Pembangunan Ekonomi berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”**, dengan program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA) dan Program Kukar Bebas. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 4.
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi: “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”					
NO.	Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatnya daya saing daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman moda	Indek Kepuasan Masyarakat (%)
2	Memperkuat Pembangunan Ekonomi berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMA/ PMDN)	Nilai Realisasi Investasi (PMA/ PMDN) Triliun Rupiah

Sumber : RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara



Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.
 Tujuan/ Sasaran Strategis DPMPSTSP Kab. Kutai Kartanegara 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target tahunan				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Triliun Rupiah	3,88	3,95	4,02	4,09	4,16
2	Meningkatkan Keualitas Pelayanan Penanaman Modal	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,12	87,75	88,25	89,52	91,73

Sumber data : Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

IV. Indikator Kinerja Utama

Setiap Sasaran Strategis Perangkat Daerah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Tujuan dari Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Tujuan dari Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu: Tingkat Pertumbuhan Investasi. Dan dari hasil pemantauan dan evaluasi capaian IKK LPPD Tahun 2022 maka Sesuai dengan surat nomor : B-1927/ TAPEM/ OTDA/ 100/ 08/ 2023 tanggal 07 Agustus 2023 terjadi perubahan atas target kinerja Tujuan, hal ini dikarenakan Target Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN meningkat pesat dikarenakan target Investasi yang kami masukan didalam RPJMD adalah target kami dimasa *Pandemi covid 19* dimana situasi ekonomi yang melambat dan tidak adanya kepastian dari keadaan tersebut, Dan ketika *Pandemi Covid 19* berakhir kami menentukan target baru seiring meningkatnya minat investasi di kutai kartanegara yang mula-mula target kami 1,73 persen menjadi 30,47 persen dimana target tersebut kami ambil dari persentase pertumbuhan investasi PMA dan PMDN dari tahun 2019 s.d tahun 2022 hal ini dapat kami simpulkan setelah kami melakukan kajian terhadap data kinerja DPMPTSP tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut diatas, Berikut disajikan IKU Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021-2026:

Tabel 6.
IKU (Indikator Kinerja Utama) DPMPTSP
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target tahunan Awal					Target tahunan Baru				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Triliun Rupiah	3,88	3,88	3,95	4,02	4,09	7	7,2	7,35	7,4	7,45
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,12	87,12	87,75	88,25	89,52	87,12	87,12	87,75	88,25	89,52

Sumber : IKU Perubahan DPMPTSP 2021-2026

V. Rencana Kerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran/ operasionalisasi dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dan akan

dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Adapun Program Kegiatan dan sub kegiatan yang telah sesuai dengan nomenklatur baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 090 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.
Rencana Kerja Tahunan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tahun 2025

NO	KODE	SASARAN/ PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			KET.
				PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
				Tolak Ukur/ Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA		Nilai Realisasi Investasi (Triliyun Rupiah)	7,45	Triliyun Rupiah	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,52	Nilai	
1	2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	77	Nilai	
	2.18.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	13	Dokumen	
	2.18.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	
	2.18.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4	Dokumen	
	2.18.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	
	2.18.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	
	2.18.01.2.01.0008		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	

NO	KODE	SASARAN/ PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			KET.
				PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
				Tolak Ukur/ Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.18.01.2.01 .0009		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	umlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	
	2.18.01.2.01 .0010		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	
	2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administasi Keuangan	80	Persen	
	2.18.01.2.02 .01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	org/ Bulan	
	2.18.01.2.02 .05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan	
	2.18.01.2.02 .06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	Dokumen	
	2.18.01.2.02 .07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12	Laporan	
	2.18.01.2.02 .08		Penyusun Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	
	2.18.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administasi Barang Milik Daerah	100	Persen	
	2.18.01.2.03 .01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2	Dokumen	
	2.18.01.2.03 .03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	1	Laporan	
	2.18.01.2.03 .04		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1	Laporan	

NO	KODE	SASARAN/ PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			KET.
				PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
				Tolak Ukur/ Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.18.01.2.03 .05		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	
	2.18.01.2.03 .06		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	
	2.18.01.2.05		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	Persen	
	2.18.01.2.05 .02		Perencanaan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	1	Dokumen	
	2.18.01.2.05 .06		Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	2	Dokumen	
	2.18.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	100	Persen	
	2.18.01.2.05 .02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	Paket	
	2.18.01.2.05 .06		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	
	2.18.01.2.05 .09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	
	2.18.01.2.05 .11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	10	Orang	
	2.18.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum	100	Persen	
	2.18.01.2.06 .02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1	Paket	
	2.18.01.2.06 .04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1	Paket	
	2.18.01.2.06 .05		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	2	Paket	
	2.18.01.2.06 .06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	12	Dokumen	
	2.18.01.2.06 .09		Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	Laporan	
	2.18.01.2.06 .10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinas Pada SKPD	500	Dokumen	

NO	KODE	SASARAN/ PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			KET.
				PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
				Tolak Ukur/ Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.18.01.2.06 .11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	0	Dokumen	
	2.18.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	
	2.18.01.2.07 .06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25	Unit	
	2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	100	Persen	
	2.18.01.2.06 .02		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	Laporan	
	2.18.01.2.06 .04		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	
	2.18.01.2.06 .05		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	
	2.18.01.2.06 .06		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Laporan	
	2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	
	2.18.01.2.06 .02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	23	Unit	
	2.18.01.2.06 .04		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	Unit	
	2.18.01.2.06 .05		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3	Unit	
2	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Jumlah Proyek (PMA/ PMD)	665	Proyek	

NO	KODE	SASARAN/ PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			KET.
				PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
				Tolak Ukur/ Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.18.02.2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	
	2.18.02.2.01 .02		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar	50	Dokumen	
	2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ kota	Jumlah Kajian Peta Potensi Investasi	3	Dokumen	
	2.18.02.2.02 .01		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	1	Dokumen	
	2.18.02.2.02 .02		Pernyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	3	Dokumen	
3	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal		Jumlah Investor (PMA/ PMDN)	200	Investor	
	2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	200	Investor	
	2.18.03.2.01 .01		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	4	Dokumen	
	2.18.03.2.01 .02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	2	Dokumen	
4	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal		Jumlah Penerbitan Izin	12500	Jumlah Izin	
	2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizin secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	IKM	89,52	Nilai	

NO	KODE	SASARAN/ PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			KET.
				PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
				Tolak Ukur/ Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.18.04.2.01 .0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	250	Pelaku Usaha	
	2.18.04.2.01 .0007		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100	Pelaku Usaha	
	2.18.04.2.01 .0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	350	Kegiatan Usaha	
5	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Penaikan /Penurunan Nilai Realisasi PMDN	0	Persen	
	2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengendalian PMA/PMDN	424	Pelaku Usaha/ Kegiatan Usaha	
	2.18.05.2.01 .01		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	60	Kegiatan Usaha	
	2.18.05.2.01 .02		Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400	Pelaku Usaha	
	2.18.05.2.01 .03		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	24	Kegiatan Usaha	

NO	KODE	SASARAN/ PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			KET.
				PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
				Tolak Ukur/ Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	2.18.05	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Jumlah Aplikasi	3	Aplikasi	
	2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Aplikasi	3	Aplikasi	
	2.18.06.2.01 .01		Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	10	Dokumen	

VI. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Reformulasi desain investasi menuju hilirsasi SDA terutama *Blue Investment* dan *Green Investment*;
2. Digitalisasi pelayanan perizinan.

VII. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8.
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Reformulasi desain investasi menuju hilirsasi SDA	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pemberian insentif pada investasi yang mentransformasikan sektor hulu menuju sektor hilir; ✚ Pengendalian investasi penanaman modal menuju hilirsasi SDA.
2	Digitalisasi pelayanan perizinan	Penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi.

VIII. Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 9.
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1	Meningkatnya daya saing daerah	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				Jumlah Investor (PMDN/ PMA)	Program Promosi Penanaman Modal
				Kenaikan/ Penurunan PMA/PMDN	Program Pengendalian Penanaman Modal
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Penerbitan Izin	Program Pelayanan Penanaman Modal
				Jumlah Aplikasi	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

IX. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/ Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target

kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 10.
Perjanjian Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Kutai Kartanegara
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keluaran/ Hasil	Keterangan / Rumus Penghitungan
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Nilai Realisasi PMDN/PMA	Triliun Rupiah	7,45	12,82	Hasil Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) pada Aplikasi NSWI
2	Meningkatnya Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,52	96,51	Hasil Survey IKM dikalikan dengan 100 (Seratus)

Selain perjanjian kinerja yang berdasarkan dari dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat perjanjian kinerja tambahan yang merupakan amanat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

Tabel 11.
Perjanjian Kinerja Tambahan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keluaran/ Hasil
1	Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,52	96,51
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,52	96,51
3	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	level	3	3
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keluaran/ Hasil
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48
10	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)	3,2568
11	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65,92
12	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	60,12
13	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90	94,46
		Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau
14	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100	100

Tabel 12.
Perbandingan Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2025
Dengan Data Awal Tahun 2022 dan Target Tahun 2025

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	DATA AWAL (2022)	TARGET (2025)	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Triliun Rupiah	7	7,4	36,40
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,12	88,25	88,25

Tabel 13.
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2025
Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Keterangan / Rumus Penghitungan
				Target	Keluaran/ Hasil	Target	Keluaran/ Hasil	
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Triliun Rupiah	7,2	16,42	7,4	12,82	Jumlah Realisasi (PMDN/ PMA) pada Aplikasi NSWI
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,25	93,06	89,52	96,51	Hasil Survey IKM dikalikan dengan 100 (Seratus)

Sedangkan untuk perjanjian kinerja tambahan tidak bisa dibandingkan dikarenakan banyaknya tambahan Indikator Kinerja Sasaran pada perjanjian kinerja tahun 2025 yang tidak ada pada perjanjian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2024).

X. Rencana Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan pada Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, maka operasionalisasi atau pelaksanaan kinerja tahunan di tuangkan dalam Rencana kerja Tahun 2025 dan Dokumen pelaksanaan Anggaran. Pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Kepmendagri 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka RENJA tahun 2025 sudah mengacu pada KEPMEN tersebut. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan anggaran murni sebesar Rp. 27.786.705.030,- melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2025 menjadi Rp. 21.179.471.884,-

Tabel 14.
Program Kegiatan dan sub kegiatan beserta anggaran (APBD) Tahun 2025

NO.	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
					27.786.705.030,00	21.179.471.884,00
I	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</i>	77 Nilai	18.856.822.130,00	16.386.169.136,00
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	13 Dokumen	1.192.000.000,00	565.569.593,00
1	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	25.797.000
2	Pelaksanaan Pengumpulan data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 data	250.000.000,00	116.458.000
3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 berita acara	50.000.000,00	31.461.200
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	4 Dokumen	592.000.000,00	262.881.393,00

NO.	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	50.000.000,00	26.044.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	26.846.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150.000.000,00	76.082.000
B	Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administasi Keuangan	80 Persen	10.892.789.071,00	10.997.224.634,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	9.894.305.945,00	10.410.826.144
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	215.000.000,00	95.266.610
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	377.483.126,00	117.525.050
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	381.000.000,00	361.666.830
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000,00	11.940.000
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dearah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administasi Barang Milik Daerah	100 Persen	337.000.000,00	204.211.310,00
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	25.000.000,00	14.846.850
2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	50.000.000,00	22.922.080
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	16.138.260

NO.	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	222.000.000,00	145.668.120
5	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	4.636.000
D	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100 Persen	20.000.000,00	13.201.340,00
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	6.876.000
2	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	10.000.000,00	6.325.340
E	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi Kepegawaian	100 Persen	552.000.000,00	252.968.760,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	127.000.000,00	0
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	100.000.000,00	55.701.380
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	75.000.000,00	54.185.380
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	250.000.000,00	143.082.000
F	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi umum	100 Persen	1.568.030.791,00	1.116.077.859,00
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	300.000.000,00	282.423.715
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	293.079.772,00	290.143.572
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	250.000.000,00	250.000.000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	561.935.145,00	231.090.572
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	50.000.000,00	42.420.000
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	0	93.015.874,00	0

NO.	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
			Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
G	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	361.000.000,00	299.101.000,00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	361.000.000,00	299.101.000
H	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	100	2.805.382.268,00	1.815.984.640,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	3.000.000,00	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	138.600.000,00	266.766.216
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.527.540.268,00	1.433.509.185
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	136.242.000,00	115.709.239
I	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.128.620.000,00	1.121.830.000,00
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	550.000.000,00	546.510.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	80 unit	498.620.000,00	495.640.000
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	80.000.000,00	79.680.000
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA	665 Proyek	2.600.000.000,00	1.717.281.800,00
A	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000,00	240.861.000,00
1	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	50 Dokumen	500.000.000,00	240.861.000

NO.	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
B	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Investasi	3 Dokumen	2.100.000.000,00	1.476.420.800,00
1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.800.000.000,00	1.262.627.000
2	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000,00	213.793.800
III	Program Promosi Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	200 Investor	1.550.000.000,00	1.098.959.200,00
A	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	200 Investor	1.550.000.000,00	1.098.959.200,00
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	4 dokumen	600.000.000,00	398.367.800
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	950.000.000,00	700.591.400
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penerbitan Izin	12500 izin	1.650.000.000,00	846.643.775,00
A	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,52 persen	1.650.000.000,00	846.643.775,00
1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	250 pelaku usaha	600.000.000,00	230.627.550
2	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	350 kegiatan usaha	600.000.000,00	260.747.800
3	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 pelaku usaha	450.000.000,00	355.268.425

NO.	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Penaikan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)	0 persen	1.200.000.000,00	619.102.773,00
A	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengendalian PMA / PMDN	424 pelaku usaha	1.200.000.000,00	619.102.773,00
1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60 pelaku usaha	200.000.000,00	90.847.800
2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 pelaku usaha	600.000.000,00	348.256.200
3	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	24 kegiatan usaha	400.000.000,00	179.998.773
VI	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aplikasi	3 aplikasi	1.929.882.900,00	511.315.200,00
A	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aplikasi	3 aplikasi	1.929.882.900,00	511.315.200,00
1	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 dokumen	1.929.882.900,00	511.315.200

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

I. Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/ IX/ 6/ B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 15.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

II. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun sebelumnya

Hasil evaluasi implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 yang merupakan periode akhir, dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 16.
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2024 dan 2025

No	Komponen Yang di Nilai	Bobot	Nilai 2024	Bobot	Nilai 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,93	30	22,54
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,00	30	24,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,20	15	12,00
4.	Evaluasi Kinerja	25	17,00	25	20,00
	Total	100	74,13	100	78,54
	Kategori		BB		BB
	Interpretasi		Sangat Baik		Sangat Baik

Sumber : LHE SAKIP DPMPTSP, 2025

Hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas pada tahun sebelumnya dilakukan penilaian sebanyak 4 (empat) komponen, adapun penilaian tahun sebelumnya mengindikasikan adanya upaya perbaikan dan/ atau tindakan korektif secara signifikan, baik tindakan korektif yang didasarkan pada rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil

Evaluasi Implementasi SAKIP tahun lalu maupun hasil evaluasi yang dilakukan secara internal/ mandiri sebagai upaya perbaikan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pohon kinerja Tingkat Kabupaten sebagai dasar penjenjangan kinerja untuk menghasilkan outcome diinginkan belum disusun sehingga berdampak pada kualitas perjanjian kinerja Tahun 2025 memuat perjanjian kinerja yang tidak relevan dengan IKU- yang merepresentasikan kinerja utama perangkat daerah: Sasaran perjanjian kinerja yang tidak relevan tersebut tidak memiliki keterkaitan antara program/kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah
- b. Perjanjian kinerja belum selaras dengan dokumen perencanaan perangkat daerah baik jangka menengah maupun jangka pendek, terhadap adanya perubahan perjanjian kinerja perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan/atau jangka pendek.
- c. Dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek perangkat daerah belum menyajikan informasi atas ketidak tercapaian target pada periode sebelumnya dan belum mengungkapkan penjelasan atau analisa yang mendalam dan komprehensif.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja-telah dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi E-Pantau; namun terdapat permasalahan bahwa pengukuran kinerja yang dilakukan oleh perangkat daerah belum sepenuhnya berdasarkan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tersebut. Hal tersebut disebabkan adanya permasalahan pada kualitas perjanjian kinerja Tahun 2025 yang masih memuat perjanjian kinerja yang tidak relevan dengan IKU perangkat daerah dan-belum dilengkapi definisi operasional pada setiap indikatornya.

3. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja telah menyajikan uraian terkait ketercapaian/kegagalan kinerja namun terhadap kualitas laporan kinerja masih terdapat permasalahan bahwa belum menyajikan alternatif solusi untuk perbaikan target kinerja di periode berikutnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 diketahui bahwa tujuan pelaporan kinerja adalah "sebagai upaya-

perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya".

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Perangkat daerah telah melaksanakan evaluasi mandiri SAKIP, namun kualitas tim evaluator internal masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan keterlibatan dalam hal implementasi SAKIP.
- b. Proses evaluasi kinerja internal perangkat daerah belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik dan belum dilaksanakan secara periodik.

Berdasarkan uraian-di atas-serta-dalam rangka-lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memperbaiki kulaifás Pohon Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
2. Perbaiki kualitas Perjanjian Kinerja sehingga benar-benar merepresentasikan kinerja Perangkat Daerah dalam hal sasaran dan indíkator, dan jika terjadi perubahan target agar dilakukan penyesuaian pada Dokumen Perencanaan terkait;
3. Perbaiki kualitas dokumen perencanaan kinerja terutama dalam hal penyajian informasi dan analisis penyebab tidak tercapainya target secara memadai;
4. Melengkapi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan manual IKU yang memuat sekurang-kurangnya deskripsi indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan indikator dan sumber data;
5. Laporan Kinerja Perangkat Daerah agar menyajikan Solusi ke depan untuk mengatasi realisasi yang tidak mencapai target;
6. Meningkatkan kompetensi dan keterlibatan tim evaluator internal dalam hal evaluasi dan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

Dan Rencana Tindak Lanjut dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Sebagai Berikut:

1. Telah melakukan perbaikan pohon kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB nomor 89 Tahun 2021;
2. Telah dilakukan perbaikan perjanjian kinerja dengan menyesuaikan dokumen perencanaan;
3. Telah melakukan perbaikan dokumen perencanaan kinerja utama dalam hal informasi dan analisis penyebab tercapainya target;
4. Telah melengkapi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan secara manual;

5. Telah membuat laporan kinerja yang menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan;

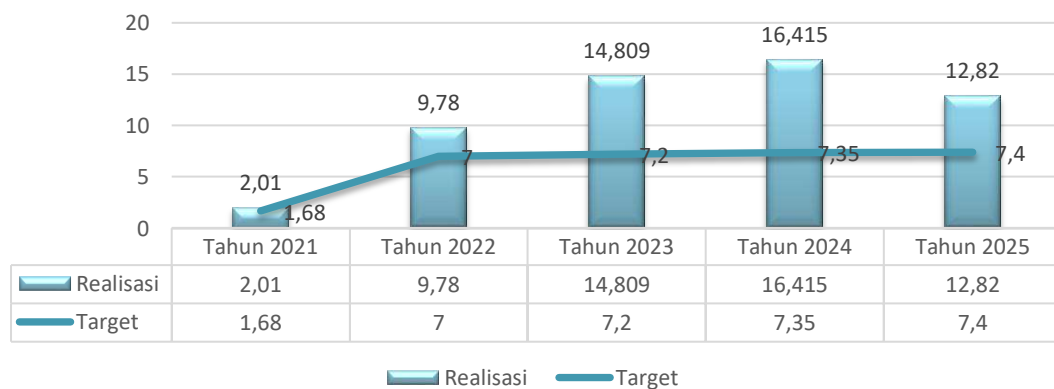
III. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 sebesar 155,24%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

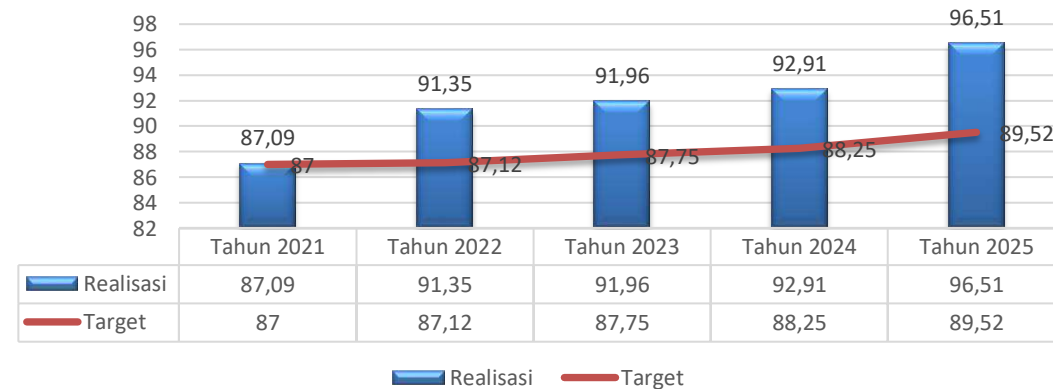
Tabel 17.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Ket
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Triliun Rupiah	1,68	2,01	119,64	7	9,78	139,71	7,2	14,809	205,68	7,35	16,415	223,33	7,4	12,82	173,24	Meningkat
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	87	87,09	100,10	87,12	91,35	104,86	87,75	91,96	104,80	88,25	93,06	105,45	89,52	96,95	109,86	Meningkat
Rata-rata						109,87%			122,28%			155,24%			164,39%			165,88%	Meningkat

Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP



Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-1” tahun 2025 capaian kinerja Nilai realisasi investasi sebesar 12,82 Triliun Rupiah dengan pertumbuhan investasi sebesar 21,93% atau capaian kinerja sebesar 173,20% (*Sumber Data: LKPM, Aplikasi NSWI, Koordinator Penanaman Modal*).

Realisasi investasi tercatat sebesar Rp12,82 triliun, atau 173,20 persen dari target investasi sebesar Rp7,4 triliun. Meskipun nilai realisasi tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan 2024, capaian tersebut tetap menunjukkan kinerja investasi yang sangat baik karena masih jauh melampaui target yang ditetapkan. Penurunan relatif ini lebih mencerminkan normalisasi realisasi investasi setelah dua tahun sebelumnya mencatat capaian yang sangat tinggi, bukan penurunan minat investasi secara struktural. Secara keseluruhan, tren tahunan realisasi investasi Tahun 2019- 2025 menunjukkan pola pertumbuhan jangka menengah yang kuat dan berkelanjutan. Peningkatan realisasi yang konsisten di atas target setiap tahunnya menjadi indikator positif bagi iklim investasi daerah, sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong investasi berkualitas, berkelanjutan, dan merata pada periode pembangunan selanjutnya.

2) Indikator Kinerja ke-2

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” tahun 2025 sebesar 89,52 dan realisasinya 96,95 atau capaian kinerja sebesar 109,86% (*sumber data: Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu*). Target kinerja melebihi target dengan kriteria penilaian Sangat tinggi, Terdapat peningkatan sebesar 2,36% dibandingkan dengan IKM tahun 2024. Pengukuran kepuasan Masyarakat (SKM) berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan parameter untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh organisasi selaku penyedia jasa layanan. Berdasarkan pengukuran tingkat kepuasan pelayanan publik di DPMPPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pada tahun 2024 ini, IKM Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada Kategori A (Sangat Baik). Hasil pengukuran kepuasan masyarakat pada 3 tahun terakhir sejak tahun 2022 menunjukkan tren yang baik (meningkat). Pada tahun 2022 nilai SKM sebesar 91,35, tahun 2023 sebesar 91,96 dan tahun 2024 sebesar 92,91.

Pengukuran ini dilakukan pada layanan publik yang disediakan/ diselenggarakan oleh DPMPPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengukuran dilakukan pada 9 unsur yang oleh Kementerian PAN dan RB telah ditetapkan sebagai parameter dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Setiap unsur diukur dengan 1 (satu) pertanyaan dengan pilihan jawaban tentang preferensi responden berdasarkan pengalaman mengakses layanan publik. Melalui cara ini maka dapat diperoleh gambaran penilaian masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara atas layanan publik yang pernah mereka terima.

IV. Perbandingan Realisasi Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten/ Kota Lainnya

Tabel 18.
Perbandingan Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Realisasi Modal Investasi PMDN (Juta Rupiah)			Jumlah 3 Tahun
	2021	2022	2023	
Paser	567.121,50	1.616.947,70	2.458.132,40	4.642.201,60
Kutai Barat	1.437.227,90	2.631.773,80	3.253.522,50	7.322.524,20
Kutai Kartanegara	3.319.550,00	10.564.907,70	9.440.538,20	23.324.995,90
Kutai Timur	5.279.054,00	3.428.929,90	5.241.826,70	13.949.810,60
Berau	445.264,40	2.619.004,00	4.303.938,70	7.368.207,10
Penajam Paser Utara	404.886,00	1.253.095,90	1.475.716,70	3.133.698,60
Mahakam Ulu	575.498,90	284.958,90	189.188,70	1.049.646,50
Balikpapan	16.773.016,60	14.681.981,50	20.501.290,70	51.956.288,80
Samarinda	585.533,30	1.270.879,50	2.894.239,20	4.750.652,00
Bontang	910.229,60	1.243.154,10	2.413.301,90	4.566.685,60
Kalimantan Timur	30.297.382,20	39.595.633,00	52.171.695,70	122.064.710,90

Sumber Data : Renstra 2025-2029

Berdasarkan data Realisasi Investasi PMDN di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki peringkat kedua setelah Kota Balikpapan dalam hal realisasi investasi selama 3 tahun berturut turut untuk PMDN sedangkan untuk PMA menduduki peringkat kedua setelah Kutai Timur.

Tabel 19.
Perbandingan Realisasi Investasi PMA Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Realisasi Modal Investasi PMA (Ribu US \$)			Jumlah 3 tahun
	2021	2022	2023	
Paser	31.190,40	109.068,58	77.903,80	218.162,78
Kutai Barat	29.653,60	198.435,49	105.779,90	333.868,99
Kutai Kartanegara	122.865,60	180.418,48	331.153,70	634.437,78
Kutai Timur	248.360,80	630.925,93	458.235,80	1.337.522,53
Berau	35.752,70	49.370,49	46.997,30	132.120,49
Penajam Paser Utara	1.602,80	9.866,00	10.907,20	22.376,00

Kabupaten/Kota	Realisasi Modal Investasi PMA (Ribu US \$)			Jumlah 3 tahun
	2021	2022	2023	
Mahakam Ulu	123,90	3.808,00	23.096,00	27.027,90
Balikpapan	193.184,10	51.882,79	244.869,10	489.935,99
Samarinda	17.125,00	32.438,00	23.518,30	73.081,30
Bontang	65.331,30	8,00	10.249,50	75.588,80
Kalimantan Timur	745.190,20	1.266.221,77	1.332.710,60	3.344.122,57

Sumber Data : Renstra 2025-2029

Realisasi investasi tersebut menunjukkan bahwa daya tarik investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat baik. Berdasarkan realisasi investasi tersebut selanjutnya digambarkan bidang usaha yang menonjol. Sebagaimana terdapat dalam data Portal *National Single Window for Investment (NSWI)*.

V. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya.

Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar **165,88%**. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2024) sebesar **164,39%**. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 1,49%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 20.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan
Realisasi Kinerja Sebelumnya (Tahun 2024)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Ket
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Triliun Rupiah	7,35	16,415	223,33%	7,4	12,82	173,24%	Meningkat
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	88,25	93,06	105,45%	89,52	96,95	109,86%	Meningkat
Rata-rata						164,39%			141,55%	Meningkat

VI. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 21.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

No.	Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2025)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2025	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2025
1	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	36,40	57,42	157,75%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,25	96,95	109,85%

Analisis atas pencapaian Sasaran Strategis yang di ukur melalui indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Target kinerja “Indikator Kinerja ke-1” tahun 2025 capaian kinerja Nilai realisasi investasi sebesar 57,42 Triliun Rupiah dengan persentase realisasi target sasaran RENSTRA sampai tahun 2025/ capaian kinerja sebesar 157,76% dan mengalami penurunan pada pertumbuhan investasi sebesar -21,93 % (*Sumber Data: LKPM, Aplikasi NSWI, Koordinator Penanaman Modal*).

Pencapaian sasaran strategis ini tergambar dengan di raihnya Penghargaan “Terbaik II Bidang Pembangunan Investasi Daerah Dalam Rangka Peringatan HUT Ke 68 Provinsi Kalimantan Timur”.

Gambar 25.
Penerimaan Penghargaan 2025



2. Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” tahun 2025 sebesar 88,25 dan realisasinya 96,95 atau capaian kinerja sebesar 109,85% (*sumber data: Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu*). Target kinerja melebihi target dengan kriteria penilaian Sangat tinggi, Terdapat peningkatan sebesar 4,41% dibandingkan dengan IKM tahun 2024.

Pencapaian sasaran strategis ini tergambar dengan di raihnya Penghargaan ‘SNI ISO/IEC 27001:2002 tahun 2025’ oleh PT. TSI SERTIFIKASI INTERNASIONAL’.

Gambar 26.
Penerimaan Penghargaan 2025



VII. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 22.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program (%)	Efisiensi (%)	Keterangan
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	-21,93%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	97,82	2,18	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program (%)	Efisiensi (%)	Keterangan
				Program Promosi Penanaman Modal	85,65	14,35	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	109,86%	Program Pelayanan Penanaman Modal	53,81	46,19	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	95,65	4,35	
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	30,02	69,98	

VIII. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah:

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal dan Pengendalian Pelayanan Penanaman modal

Indikator kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yaitu Jumlah Proyek tahun 2025 dengan target kinerja program sebesar 665 Proyek dan realisasinya sebesar 5472 Proyek atau capaian kinerja sebesar 822,86%.

Tabel 23.

Indikator Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal dan Pengendalian Pelayanan Penanaman Modal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	665	5472	822,86
			Program Promosi Penanaman Modal	200	200	100,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0,00	-21,93	0

Sumber Data : LKPM, Aplikasi NSWI, Koord. Penanaman Modal DPMPSTSP

Gambar 24.
Pendampingan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal



Sumber Data : Koord. Penanaman Modal DPMPSTSP 2025



Sumber Data : Koord. Penanaman Modal DPMPPTSP 2025

2) Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan target kinerja program sebesar 88,25 dan realisasinya sebesar 96,95 atau capaian kinerja sebesar 109,86%. Target kinerja tercapai dan melebihi target hal ini dikarenakan berdasarkan hasil analisis kinerja masing- masing indikator survei kepuasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengukuran ini dilakukan pada layanan publik yang disediakan/ diselenggarakan oleh DPMPPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengukuran dilakukan pada 9 unsur yang oleh Kementerian PAN dan RB telah ditetapkan sebagai parameter dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Setiap unsur diukur dengan 1 (satu) pertanyaan dengan pilihan jawaban tentang preferensi responden berdasarkan pengalaman mengakses layanan publik. Melalui cara ini maka dapat diperoleh gambaran penilaian masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara atas layanan publik yang pernah mereka terima.

Tabel 24.
Indikator Program Pelayanan Penanaman Modal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal	12.500	13294	106,35
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	3	3	100

Sumber Data: Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 2025, Koord. PTSP DPMPTSP

Berikut data hasil capaian kinerja program penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2025

Tabel 25.
Capaian Kinerja Program (Keberhasilan/ Kegagalan)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	665	6158	926,01	Berhasil
			Program Promosi Penanaman Modal	200	200	100,00	Berhasil
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0,00	-21,93	0	Tidak Berhasil
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal	12.500	13294	106,35	Berhasil
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	3	3	100-29	Berhasil

IX. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi anggaran program/ kegiatan Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 87,48%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 26.
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2025

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Total Pagu Perubahan TA 2025	Realisasi	Sisa Pagu	%
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	21.179.471.884,00	18.527.598.302,00	2.651.873.582,00	87,48
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.386.169.136,00	14.705.182.015,00	1.680.987.121,00	89,74
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	565.569.593,00	468.864.104,00	96.705.489,00	82,90
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	262.881.393,00	216.405.550,00	46.475.843,00	82,32
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA - DPA	26.044.000	25.444.000,00	600.000,00	97,70
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.846.000	21.508.600,00	5.337.400,00	80,12
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Perangkat Daerah	76.082.000	73.059.900,00	3.022.100,00	96,03
2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.797.000	16.367.248,00	9.429.752,00	63,45
2.18.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	116.458.000	90.079.106,00	26.378.894,00	77,35
2.18.01.2.01.0007	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	31.461.200	25.999.700,00	5.461.500,00	82,64
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.997.224.634	10.004.026.412	993.198.222	90,97
2.18.01.2.02.0001	Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK	10.410.826.144	9.712.055.149,00	698.770.995,00	93,29
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	95.266.610	32.910.513,00	62.356.097,00	34,55

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Total Pagu Perubahan TA 2025	Realisasi	Sisa Pagu	%
2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	117.525.050	56.208.000,00	61.317.050,00	47,83
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	361.666.830	196.792.750,00	164.874.080,00	54,41
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.940.000	6.060.000,00	5.880.000,00	50,75
<i>2.18.01.2.03</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>204.211.310</i>	<i>96.017.736</i>	<i>108.193.574</i>	<i>47,02</i>
2.18.01.2.03.0001	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Perencanaan,Kebutuhan BMD)	14.846.850		14.846.850,00	-
2.18.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian BMD	22.922.080	18.448.868,00	4.473.212,00	80,49
2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	16.138.260		16.138.260,00	-
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan BMD	145.668.120	72.932.868,00	72.735.252,00	50,07
2.18.01.2.03.0007	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Pemanfaatan BMD)	4.636.000	4.636.000,00	-	100,00
<i>2.18.01.2.04</i>	<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>13.201.340</i>	<i>13.201.000</i>	<i>340</i>	<i>100,00</i>
2.18.01.2.04.0001	Perencanaan,Pengolahan Retrebusi Daerah	6.876.000	6.876.000	-	100,00
2.18.01.2.04.0007	Pelaporan Pengolahan Retrebusi Daerah	6.325.340	6.325.000	340,00	99,99
<i>2.18.01.2.05</i>	<i>Administrai Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>252.968.760</i>	<i>149.414.865</i>	<i>103.553.895</i>	<i>59,06</i>
2.18.01.2.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	55.701.380	43.634.165,00	12.067.215,00	78,34

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Total Pagu Perubahan TA 2025	Realisasi	Sisa Pagu	%
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.185.380	18.890.000,00	35.295.380,00	34,86
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	143.082.000	86.890.700,00	56.191.300,00	60,73
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.116.077.859	1.088.684.800	27.393.059	97,55
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	282.423.715	282.423.715,00	-	100,00
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	290.143.572	288.877.700,00	1.265.872,00	99,56
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.000.000	232.330.200,00	17.669.800,00	92,93
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	19.994.000,00	6.000,00	99,97
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231.090.572	222.639.185,00	8.451.387,00	96,34
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis	42.420.000	42.420.000,00	-	100,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	299.101.000	290.084.100	9.016.900	96,99
2.18.01.2.07.0006	Penggandaan Peralalatan Mesin dan Lainnya	299.101.000	290.084.100,00	9.016.900,00	96,99
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.815.984.640	1.631.333.258	184.651.382	89,83
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	266.766.216	124.613.035,00	142.153.181,00	46,71
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.709.239	109.848.850,00	5.860.389,00	94,94
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.433.509.185	1.396.871.373,00	36.637.812,00	97,44

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Total Pagu Perubahan TA 2025	Realisasi	Sisa Pagu	%
2.18.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.121.830.000	963.555.740	158.274.260	85,89
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Prorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	495.640.000	363.745.740,00	131.894.260,00	73,39
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	79.680.000	53.911.000,00	25.769.000,00	67,66
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunnya Lainnya	546.510.000	545.899.000,00	611.000,00	99,89
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.717.281.800	1.679.913.709	37.368.091	97,82
2.18.02.2.01	<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	240.861.000	215.497.904	25.363.096	89,47
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	240.861.000	215.497.904,00	25.363.096,00	89,47
2.18.02.2.02	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	1.476.420.800	1.464.415.805	12.004.995	99,19
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	213.793.800	202.598.805,00	11.194.995,00	94,76
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1.262.627.000	1.261.817.000,00	810.000,00	99,94
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.098.959.200	941.227.054	157.732.146	85,65

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Total Pagu Perubahan TA 2025	Realisasi	Sisa Pagu	%
2.18.03.2.02	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.098.959.200	941.227.054	157.732.146	85,65
2.18.03.2.02.000 2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	398.367.800	282.300.800	116.067.000,00	70,86
2.18.03.2.02.000 3	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	700.591.400	658.926.254	41.665.146,00	94,05
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	846.643.775	455.605.632	391.038.143	53,81
02.18.04.2.01	<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	846.643.775	455.605.632	391.038.143	53,81
02.18.04.2.01.00 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	230.627.550	169.617.072,00	61.010.478,00	73,55
02.18.04.2.01.00 07	Penyediaan dan Pengolahan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	355.268.425	35.234.696,00	320.033.729,00	9,92
02.18.04.2.01.00 08	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	260.747.800	250.753.864,00	9.993.936,00	96,17
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	619.102.773	592.187.535	26.915.238	95,65

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Total Pagu Perubahan TA 2025	Realisasi	Sisa Pagu	%
02.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	619.102.773	592.187.535,00	26.915.238,00	95,65
02.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	90.847.800	88.980.469,00	1.867.331,00	97,94
02.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	348.256.200	338.266.477,00	9.989.723,00	97,13
02.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	179.998.773	164.940.589,00	15.058.184,00	91,63
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	511.315.200	153.482.357	357.832.843	30,02
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	511.315.200	153.482.357	357.832.843	30,02
2.18.06.2.01.0002	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	511.315.200	153.482.357,00	357.832.843,00	30,02
	JUMLAH	21.179.471.884,00	18.527.598.302,00	2.651.873.582,00	87,48

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2024) realisasi anggaran sebesar **83,14%**, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 27.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2024)

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Total Pagu Perubahan TA 2024	Realisasi	Sisa Pagu	%
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	23.352.398.850,00	19.414.613.701,00	3.937.785.149,00	83,14
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.453.909.214,00	14.662.779.021,00	1.791.130.193,00	89,11
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	786.959.126,00	762.735.913,00	24.223.213,00	96,92
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	275.961.000,00	268.693.832,00	7.267.168,00	97,37
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	85.000.000,00	75.601.900,00	9.398.100,00	88,94
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	425.998.126,00	418.440.181,00	7.557.945,00	98,23
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.718.011.530,00	9.324.570.313,00	1.393.441.217,00	87,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Total Pagu Perubahan TA 2024	Realisasi	Sisa Pagu	%
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.312.681.530,00	8.923.235.209,00	1.389.446.321,00	86,53
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	65.000.000,00	64.677.799,00	322.201,00	99,50
2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	24.330.000,00	24.306.900,00	23.100,00	99,91
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	286.000.000,00	283.600.000,00	2.400.000,00	99,16
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	30.000.000,00	28.750.405,00	1.249.595,00	95,83
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.664.000,00	91.496.725,00	9.167.275,00	90,89
2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	30.664.000,00	22.846.972,00	7.817.028,00	74,51
2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	70.000.000,00	68.649.753,00	1.350.247,00	98,07
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	802.000.000,00	786.777.803,00	15.222.197,00	98,10
2.18.01.2.05.0001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	127.000.000,00	116.852.000,00	10.148.000,00	92,01
2.18.01.2.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.000.000,00	95.761.802,00	4.238.198,00	95,76
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	74.164.001,00	835.999,00	98,89
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.150.238.545,00	1.130.291.765,00	19.946.780,00	98,27
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.000.000,00	166.407.400,00	3.592.600,00	97,89
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.000.000,00	249.076.000,00	924.000,00	99,63
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.303.400,00	88.303.400,00	-	100,00
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	30.000.000,00	19.890.000,00	10.110.000,00	66,30
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	561.935.145,00	556.614.965,00	5.320.180,00	99,05
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.226.000,00	340.806.000,00	46.420.000,00	88,01
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	387.226.000,00	340.806.000,00	46.420.000,00	88,01
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.851.013.649,00	1.773.270.751,00	77.742.898,00	95,80
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.599.000,00	5.492.000,00	107.000,00	98,09
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.144.389,00	116.225.810,00	11.918.579,00	90,70
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.567.790.260,00	1.502.956.941,00	64.833.319,00	95,86
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.480.000,00	148.596.000,00	884.000,00	99,41
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.796.364,00	452.829.751,00	204.966.613,00	68,84
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	316.930.000,00	316.930.000,00	-	100,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Total Pagu Perubahan TA 2024	Realisasi	Sisa Pagu	%
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.866.364,00	74.747.800,00	1.118.564,00	98,53
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	265.000.000,00	61.151.951,00	203.848.049,00	23,08
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.150.000.000,00	1.148.040.385,00	1.959.615,00	99,83
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	199.223.310,00	776.690,00	99,61
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	200.000.000,00	199.223.310,00	776.690,00	99,61
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	950.000.000,00	948.817.075,00	1.182.925,00	99,88
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	299.279.786,00	720.214,00	99,76
2.18.02.2.02.0004	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	650.000.000,00	649.537.289,00	462.711,00	99,93
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.081.660.000,00	1.077.936.018,00	3.723.982,00	99,66
2.18.03.2.02	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.081.660.000,00	1.077.936.018,00	3.723.982,00	99,66
2.18.03.2.02.0002	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	81.660.000,00	80.659.600,00	1.000.400,00	98,77
2.18.03.2.02.0003	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	997.276.418,00	2.723.582,00	99,73
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	894.053.636,00	839.436.788,00	54.616.848,00	93,89
02.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	894.053.636,00	839.436.788,00	54.616.848,00	93,89
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
02.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	275.000.000,00	273.587.450,00	1.412.550,00	99,49
02.18.04.2.01.0007	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	300.000.000,00	246.795.702,00	53.204.298,00	82,27
02.18.04.2.01.0008	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	279.053.636,00	279.053.636,00	-	100,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.229.923.000,00	885.676.489,00	344.246.511,00	72,01
02.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.229.923.000,00	885.676.489,00	344.246.511,00	72,01
02.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	251.437.000,00	144.871.674,00	106.565.326,00	57,62
02.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	535.734.000,00	445.753.895,00	89.980.105,00	83,20
02.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	442.752.000,00	295.050.920,00	147.701.080,00	66,64
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	2.542.853.000,00	800.745.000,00	1.742.108.000,00	31,49

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Total Pagu Perubahan TA 2024	Realisasi	Sisa Pagu	%
	INFORMASI PENANAMAN MODAL				
2.18.06.2.01	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.542.853.000,00	800.745.000,00	1.742.108.000,00	31,49
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.542.853.000,00	800.745.000,00	1.742.108.000,00	31,49
	JUMLAH	23.352.398.850,00	19.414.613.701,00	3.937.785.149,00	83,14

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum telah berjalan sesuai dengan mandat kelembagaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Organisasi telah didukung oleh struktur kelembagaan yang jelas, sumber daya manusia yang memadai, serta sarana dan prasarana pelayanan yang relatif baik, termasuk pengembangan sistem pelayanan berbasis digital yang terintegrasi.

Dari sisi kelembagaan, pemerintah daerah telah memiliki perangkat pendukung iklim investasi berupa regulasi insentif penanaman modal, dokumen IPRO (Investment Project Ready to Offer), serta Peta Potensi Investasi (PPI). Hal ini menunjukkan bahwa fondasi kebijakan dan informasi investasi daerah telah tersedia sebagai instrumen dalam meningkatkan daya tarik investasi.

Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi saat ini tidak lagi berkaitan dengan ketersediaan kebijakan dan dokumen investasi, melainkan pada optimalisasi implementasi dan pemanfaatannya. Pemanfaatan IPRO dan PPI dalam mendukung promosi investasi, fasilitasi investor, serta integrasi dengan perencanaan sektoral belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Akibatnya, potensi investasi yang telah teridentifikasi belum seluruhnya mampu dikonversi menjadi realisasi investasi yang optimal.

Di sisi pelayanan, meskipun sistem perizinan telah berjalan dengan dukungan digitalisasi, penguatan masih diperlukan terutama dalam fungsi konsultasi, pendampingan, dan pengaduan. Pelayanan perizinan perlu terus berkembang dari sekadar fungsi administratif menuju fungsi fasilitatif yang mampu memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor.

Selain itu, pengendalian dan koordinasi investasi lintas sektor masih memerlukan penguatan agar proses pemantauan, pembinaan, dan pengawasan investasi dapat berjalan secara lebih terintegrasi. Keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan dengan kebutuhan ideal organisasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan fungsi strategis.

Dari aspek sarana dan prasarana, meskipun telah tersedia dukungan fasilitas pelayanan yang cukup, peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas masih

diperlukan untuk menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin adaptif dan berbasis teknologi.

Dengan demikian, pelaksanaan kinerja Tahun 2025 telah menunjukkan kemajuan dalam penyediaan kebijakan dan instrumen investasi daerah, namun masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi, integrasi, dan pemanfaatan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal secara berkelanjutan.

II. Perbaikan Kedepan

Sebagai upaya peningkatan kinerja di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Adapun langkah-langkah perbaikan tersebut yaitu:

1. Perlu dilakukan penguatan implementasi kebijakan insentif penanaman modal agar lebih operasional dan berdampak nyata terhadap keputusan investasi. Pemanfaatan regulasi insentif perlu diintegrasikan dengan strategi promosi dan fasilitasi investasi.
2. Optimalisasi pemanfaatan IPRO dan PPI perlu diarahkan sebagai instrumen utama dalam promosi investasi daerah. Dokumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai inventarisasi potensi, tetapi juga sebagai dasar penyusunan paket investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor.
3. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan perlu difokuskan pada penguatan fungsi konsultasi, pendampingan, dan penyelesaian permasalahan investasi, sehingga pelayanan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mampu memberikan dukungan substantif terhadap kegiatan penanaman modal.
4. Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah perlu terus dilakukan untuk memastikan integrasi antara kebijakan investasi dengan perencanaan sektoral dan pengembangan wilayah. Koordinasi ini penting untuk mempercepat realisasi investasi dan meminimalkan hambatan implementasi di lapangan.
5. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian melalui peningkatan kompetensi di bidang fasilitasi investasi, analisis kebijakan, serta pengelolaan sistem informasi investasi.
6. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan perlu diarahkan pada modernisasi fasilitas dan peningkatan dukungan teknologi informasi guna menunjang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang lebih adaptif dan responsif.

Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara dapat meningkatkan peran strategisnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya tarik investasi, serta

memperluas dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kutai Kartanegara, 23 Februari 2026

Kepala

Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Kutai Kartanegara,



ALFIAN NOOR, SE., M. LING.

Pembina Utama Muda- IV/c

NIP. 19690113 199503 1 005

**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**



2025



**JALAN WOLTER MONGINSIDI KOMPLEK PERKANTORAN
BUPATI GEDUNG D, KELURAHAN TIMBAU, TENGGARONG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 75511**